

---

**Peran Pemerintah Provinsi Dalam Pemberdayaan Masyarakat  
Peternak Ikan Air Tawar Di Kecamatan Dimembe  
(Suatu Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara)**

**Rivaldo Steni Imanuel Lumangkun<sup>1</sup>**

**Marlien Lopian<sup>2</sup>**

**Stefanus Sampe<sup>3</sup>**

## **ABSTRAK**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan di dalam area segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial, dalam arti lain pemberdayaan masyarakat merupakan peningkatan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat pun sangat beragam seperti di bidang pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, perikanan, dan lain sebagainya. termasuk pemberdayaan di bidang peternakan di daerah. Penelitian ini bertujuan. mengetahui peran pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dalam memberdayakan masyarakat peternak ikan air tawar di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Serta agar supaya peternak ikan air tawar mendapat perhatian yang lebih dari pembuat kebijakan atau pemerintah, dalam rangka mengembangkan potensi untuk menciptakan masyarakat yang maju, hebat dan berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori dari Prof. Totok Mardikanto (dalam buku "*Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*". 2012 : 114-117), yang mengatakan bahwa upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah bina usaha, bina manusia, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Dari hasil penelitian disimpulkan. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemberdayaan Masyarakat Peternak Ikan Air Tawar di Kecamatan Dimembe belum tercapai sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Dinas KP Provinsi Sulut

**Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Pemberdayaan, Peternak Ikan Air Tawar**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Salah satu kebutuhan protein hewani masyarakat didapatkan dari ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar. Ikan air tawar diperoleh dari sungai, danau atau budidaya ikan di kolam. Pembudidayaan ikan air tawar juga dilakukan dengan jaring-jaring terapung atau keramba ditepi danau dan sungai.

Konsep awalnya dalam pengembangan usaha budidaya ikan bermula karena keberhasilan penyebaran ikan mujair untuk mencukupi gizi masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila tingkat produktifitas dan kemampuan berkembang biak ikan mujair cukup tinggi. Sejalan dengan itu, perlu adanya sinergitas antara pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten maupun provinsi untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di daerahnya, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan membudidayakan ikan air tawar demi mendongkrak perekonomian keluarganya.

Di bidang perikanan, pemberdayaan masyarakat merupakan salahsatu program dari Dinas Kelautan dan Perikanansepertimemberikan fasilitas bagi masyarakat yangmembentuk kelompok peternak ikan air tawar.

Dalam kenyataannya, ada kalanya seseorang menjadikan aktifitas membudidayakan ikan air tawar sebagai mata pencaharian pokok dan ada pula yang hanya dijadikan sebagai kegiatan tambahan yang memungkinkan bisa meningkatkan pendapatan untuk menopang hidup.

Memberdayakan masyarakat kelompok peternak ikan air tawar tidaklah sama seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam lingkungan masyarakat peternak ikan air tawarterdapat dua kelompok, diantaranya:

1. Kelompok peternak ikan air tawar musiman,

2. Kelompok peternak ikan air tawar tetap.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk kelompok peternak ikan air tawar haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah deangan daerah lainnya.

Pemberdayaan kelompok peternak ikan air tawar haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan tersebut harus langsung menyentuh kelompok itu sendiri dan harus tepatsasaran.

Masyarakat diwujudkan dalam arahpendekatan program yang memusatkan pada“pemberdayaan masyarakat”.Pemerintah menyediakan layananprogram pemberdayaan masyarakat luasmaupun kelompok tertentu, dan pemberdayaan tidak dapat terlepas daripartipasi masyarakat. Perlu ada peran aktif masyarakat untukberpartisipasi dan terlibat dalam pembangunan, sehingga mampumengembangkan dayanya secara kreatif sertamemiliki kesadaran kritis.

Partisipasi masyarakat merupakankeikutsertaandalam prosesidentifikasi masalah dan potensi yangada ditengah masyarakat.Pemilihan danpengambilan keputusan adalah solusi alternatifuntuk pelaksanaanupaya mengatasi masalah serta keterlibatanmasyarakat dalam proses mengevaluasiperubahan yang terjadi.Salah satu alternatif meningkatkankesejahteraan masyarakat dibidang ekonomiadalah melalui budidaya ikan air tawar.

Program pemberdayaan peternak ikan air tawar harus dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan konsep berbasis pada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut melalui pendekatan yang tanggap dari pemerintah terhadap masyarakat.

Pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan ini ialah bersama-sama menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat butuhkan, bersedia untuk berkontribusi, membiayai dan dapat mengelola serta menjaga sehingga terbentuk rasa memiliki terhadap kegiatan yang dilakukan dan mengelolanya secara sukarela.

Program pemberdayaan peternak ikan air tawar telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dengan dibentuknya beberapa kelompok peternak ikan air tawar. Akan tetapi realitanya, masih banyak kendala serta masalah yang terjadi, seperti kurangnya peran dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mensosialisasikan dan memberikan bantuan yang merata bagi kelompok-kelompok peternak ikan air tawar yang telah dibentuk.

### Tinjauan Pustaka

#### Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (dalam buku *Teori Peranan* 2002 : 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.

Menurut Abu Ahmadi (dalam bukunya "*Psikologi Sosial*". 2007 : 106) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya, sedangkan menurut Gros, Masson dan McEachen (dikutip dari buku karya David Berry "*Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*". 2003 : 99) peran berarti seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

#### Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pemberdayaan Masyarakat

**Empowerment**, yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya Eropa. Konsep empowerment mulai nampak di sekitar dekade 70-an, dan kemudian berkembang terus sepanjang dekade 80-an hingga saat ini. Pemberdayaan atau empowerment merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan (power). Pemberdayaan apapun asumsinya adalah menerima adanya kekuasaan sebagai faktor, dan membuat yang tidak berkuasa menjadi memiliki kekuasaan, yaitu yang powerless diberi power melalui empowerment sehingga menjadi powerful (dikutip dalam buku Onny S. Prijono dan A.M.V. Pranarka "*Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*". 1996 : 44)

Konsep Pemberdayaan pada perkembangannya memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang memiliki komitmen tinggi terhadap usaha memajukan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Jim Ife (dalam bukunya "*Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*". 1995 : 182), yaitu "Empowerment means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their

community (Pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Senada dengan pengertian diatas, Adi Isbandi Rukminto (dalam buku *"Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas"*. 2001 : 32) mengemukakan bahwa proses Pemberdayaan ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya atas keputusan dan tindakan yang terkait dengan diri mereka, dengan mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial untuk melatih daya yang ada, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya dan melalui transfer daya dari lingkungannya.

Pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya (kekuatan) yang dimiliki masyarakat, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Menurut Sumodiningrat (dalam buku *"Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial"*. 2000 : 109) tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah : (1) meningkatnya peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan, (2) berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat di pedesaan, dan (3) berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparat maupun warga.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat menurut Adi Isbandi Rukminto (dalam buku *"Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas"*. 2001 : 32) yang pada dasarnya merupakan pembangunan sosial (social development), dapat dilakukan atau diperankan oleh individu, oleh masyarakat atau komunitas, maupun oleh pemerintah.

Tentang hal ini, Prof. Totok Mardikanto (dalam buku *"Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik"*. 2012 : 114-117) mengembangkan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebut sebagai Tri Bina oleh Sumadyo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012 : 113) menjadi empat upaya pokok, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepaspisahkan dengan konsep sentral, yaitu konsep Power (daya).

#### **Peternak Ikan Air Tawar**

Dilihat dari asal katanya, istilah akuakultur diambil dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu **Aquaculture**. Akuakultur merupakan suatu proses pembiakan organisme perairan dari mulai proses produksi, penanganan hasil sampai pemasaran (dalam *"Kamus Akuakultur Budidaya Perikanan"*. 2019 : 1).

Berdasarkan kata penyusunnya, budidaya perikanan tentunya tersusun dari dua kata yakni budidaya dan perikanan. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil, sedangkan perikanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penangkapan, pemeliharaan dan pembudidayaan ikan. Jadi budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan ikan guna mendapatkan manfaat atau hasil.

Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam hayati, mulai dari berbagai jenis hewan sampai tumbuhan hidup di daerah ini. Hal ini disebabkan karena letak geografis Indonesia hanya memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan penghujan atau beriklim tropis. Dan efeknya hampir semua makhluk hidup termasuk hewan ternak bisa hidup di Indonesia dengan iklim tropis.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori dari Prof. Totok Mardikanto (dalam buku *"Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik"*. 2012 : 114-117), Menurut Miles dan Huberman (dalam buku *"Analisis Data Kualitatif"*. 1992 : 16), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

### Pembahasan

Dalam misi membangun Indonesia jangka panjang, salah satunya adalah mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Amanat ini dituangkan dalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai pembangunan yang strategis.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di daerah yang secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memnuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pangan dan gizi yang aman bagi kesehatan. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan perikanan budidaya sebagai ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan masyarakat. Kondisi ini dimungkinkan oleh besarnya potensi pengembangan perikanan budidaya dibandingkan tingkat pemanfaatannya saat ini, kandungan gizi dan keamanan protein hewani asal ikan serta karakteristik

usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan di dalam area segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial, dalam arti lain pemberdayaan masyarakat merupakan peningkatan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat pun sangat beragam seperti di bidang pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, perikanan, dan lain sebagainya.

Di bidang perikanan, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program dari Dinas Kelautan dan Perikanan seperti memberikan fasilitas bagi masyarakat yang membentuk kelompok peternak ikan air tawar. Prof. Totok Mardikanto (dalam buku *"Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik"*. 2012 : 114-117), mengatakan bahwa upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah :

#### 1. Bina Manusia

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan (kemampuan dan perbaikan posisi-tawar) masyarakat. Oleh sebab itu lingkup dari pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia ini difokuskan pada dua hal, yaitu :

##### a. Peningkatan Kemampuan Masyarakat

Peningkatan kemampuan masyarakat yang akan diupayakan melalui pemberdayaan ini diutamakan kepada: sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian. Di mana sikap kewirausahaan sendiri adalah sikap inovatif, mengacu kepada kebutuhan (masyarakat) pasar, serta optimalisasi sumberdaya

- lokal. Sikap profesional diartikan sebagai terus menerus mengembangkan keahlian sesuai kompetensinya, bangga dan mencintai profesinya, serta memegang teguh etika profesinya. Sedangkan kemandirian diartikan sebagai kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya dan masyarakat.
- b. Perbaikan Posisi-Tawar  
Pada bagian ini pengorganisasian masyarakat akan memainkan peran strategis. Tidak hanya menyusun kekuatan bersama, tetapi juga dalam membangun jejaring antara pemangku kepentingan yang terdiri dari: birokrasi, akademisi, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan pengelola media.
  2. Bina Usaha  
Berkaitan dengan bina usaha yang dilakukan, terdapat peluang bisnis yang sangat *captive* untuk jangka panjang, yang dapat dilakukan (dengan lebih efisien) oleh UMKM di Indonesia, yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan dunia akan komoditas yang tergolong dalam kelompok 4F, yaitu *Food* (pangan), *Fibers* (serat-seratan), *Fitopharmaca* (biopharmaca), dan *Fuel* (Biofuel). Oleh sebab itu, bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat ini akan mencakup banyak hal, seperti :
    - a. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu, dan nilai tambah produk.
    - b. Perbaikan manajemen, untuk meningkatkan efisiensi usaha dan pengembangan jejaring kemitraan.
    - c. Pengembangan jiwa kewirausahaan, terkait dengan optimalisasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.
    - d. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi.
    - e. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.
  3. Bina Lingkungan  
Bina lingkungan ialah terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan. Contohnya :
    - a. Pembuatan tambak atau kolam penangkaran ikan yang ramah lingkungan, mulai dari bahan yang digunakan hingga tempat pembuatan tambak yang tidak merugikan orang lain ataupun alam sekitar.
    - b. Pengetahuan akan segala jenis pakan ikan serta limbah-limbah yang terbentuk dari pakan atau ikan-ikan yang tidak berhasil dibudidayakan, agar tidak merusak lingkungan.
  4. Bina Kelembagaan  
Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan mensyaratkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Artinya, bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan.  
Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang harus ada untuk mendorong masyarakat membentuk kelompok-kelompok budidaya ikan adalah dengan adanya :
    - a. Balai penyuluhan yang disediakan untuk memfasilitasi masyarakat, contohnya sosialisasi tentang cara membudidayakan ikan dengan baik, tempat mengumpulkan bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait.
    - b. Struktur atau lembaga yang jelas untuk menaungi ataupun memberi masukan kepada masyarakat serta kelompok-kelompok pembudidaya ikan, agar tercipta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa mereka punya lembaga yang jelas untuk memberikan solusi dari

setiap masalah yang dihadapi terkait pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjelaskan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara kepada masyarakat maka peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Synthia I. Rondonuwu selaku Kepala Seksi Produksi Budidaya Dinas KP Provinsi Sulut.

1. Apakah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara selalumelakukan pemberdayaan masyarakat di bidang budidaya perikanan?

- Ya, setiap tahunnya kami selalu melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat dan UPR yang ada di Sulawesi Utara.

2. Program Kerja seperti apa yang dilaksanakan oleh Dinas KP Provinsi Sulut?

- Ada beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas KP Provinsi Sulut, contohnya pada tahun 2019 sebelum terjadi Pandemi COVID-19, kami melaksanakan 3 kegiatan di 4 tempat berbeda di Sulawesi Utara, yaitu Sosialisasi dan Sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), di Desa Dimembe dan Desa Talawaan di Kabupaten Minahasa Utara serta CPIB di Kabupaten Minahasa dan CPP (Cara Pembenihan dan Pembesaran) di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kami juga melakukan pelatihan bagaimana cara budidaya ikan dengan teknik Mina Padi (Teknik Budidaya di daerah hamparan sawah) serta teknik Bioflok (Teknik Budidaya dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bermanfaat sebagai makanan alami ikan.

3. Apakah setiap kegiatan yang dilaksanakan olehDinas KP Provinsi Sulut selalu di tempat yang berbeda?

- Ya, sebisa mungkin kami melaksanakan kegiatan di tempat yang berbeda-beda, tujuannya agar program kerja kami bisa dirasakan oleh masyarakat di seluruh Sulawesi Utara. Tapi kami juga melakukan observasi terhadap area yang akan dijadikan tempat untuk melaksanakan program kerja kami, apakah lahannya baik, perairannya baik untuk diberikan bantuan benih untuk dibudidayakan atau tidak.

4. Bagaimana mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat?

- Mekanismenya adalah masyarakat atau kelompok yang biasa disebut UPR (Unit Pembenihan Rakyat) atau POKDAKAN (Kelompok Budidaya Ikan) membuat Proposal yang menjelaskan secara detail mengenai anggaran serta bahan yang diperlukan seperti Benih, Pakan, Alat-alat untuk menunjang kegiatan Budidaya. Setelah diajukan, proposal akan kami tinjau kembali dalam rapat akhir tahun untuk merancang program kerja setahun kedepannya. Aspek paling penting diterimanya proposal masyarakat adalah mengenai anggaran, jika anggaran cukup, maka proposal tersebut bisa dijadikan program kerja kami kedepan.

5. Untuk menerima bantuan dari Dinas KP Provinsi Sulut, apakah ada syarat khusus?

- Ya, untuk penerimaan bantuan, pembuatan Kelompok Budidaya Ikan maupun UPR syaratnya sama. Harus beranggotakan minimal 10 orang, bukan merupakan anggota TNI/POLRI, ASN, Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan, maupun karyawan BUMN.

6. Bantuan seperti apakah yang biasanya diberikan kepada masyarakat?

- Bantuan biasanya diberikan berupa Benih (Calon Induk dan Induk), Pakan Ikan, Alat-alat seperti Jaring dan Sepatu Boot serta Tambak-tambak ikan.

Untuk mengkonfirmasi jawabanyang telah diutarakan oleh Dinas KP Provinsi Sulut, maka peneliti

melakukan wawancara dengan pemerintah Kecamatan Dimembe yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Kecamatan Dimembe Bpk. Hedy D.J. Pontoh :

1. Bagaimana peran Dinas KP Provinsi Sulut dalam memberdayakan masyarakat di bidang Budidaya Perikanan?

- Sejauh ini saya melihat Dinas KP Provinsi Sulut sudah cukup aktif untuk memberdayakan masyarakat Kecamatan Dimembe di bidang Budidaya Perikanan dengan melakukan sosialisasi serta pelatihan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang mata pencahariannya hanya sebagai pembudidaya atau peternak ikan.

2. Apakah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas KP Provinsi Sulut di area pemerintahan Kecamatan Dimembe selalu melalui atau melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Dimembe?

- Sayangnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas KP Provinsi Sulut tidak melalui Pemerintah Kecamatan Dimembe maupun berkoordinasi dengan kami. Saya tidak tahu apakah SOPnya seperti itu atau bagaimana, yang jelas kami tidak menerima surat pemberitahuan mengenai kegiatan ataupun pemberian bantuan oleh Dinas KP Provinsi Sulut kepada masyarakat Kecamatan Dimembe. Tapi harapan kami untuk kedepannya adalah setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat Kecamatan Dimembe yang dilakukan oleh Dinas KP Provinsi Sulut nantinya akan berkoordinasi dengan kami, agar supaya ada hal yang dapat kami sampaikan kepada atasan kami mengenai bidang budidaya di Kecamatan Dimembe.

Selain perwakilan dari Dinas KP Provinsi Sulut dan Pemerintah Kecamatan Dimembe, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang merupakan subjek dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas KP Provinsi Sulut demi menunjukkan peran serta pendampingan terhadap masyarakat di

bidang budidaya perikanan, dalam kesempatan ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Marthen Tuwaidan selaku perwakilan dari UPR (Unit Pembenihan Rakyat) Minapolitan Desa Dimembe, yang turut hadir pada saat kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Sertifikasi CPIB dan CBIB di UPR Kecamatan Dimembe Tahun 2019 :

1. Sejauh ini, bagaimana peran Dinas KP Provinsi Sulut dalam memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Dimembe?

- Sejauh ini saya melihat peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik, mulai dari pembinaan, pelatihan serta bantuan yang diberikan sudah baik, hanya saja masih ada beberapa kendala ataupun saran yang bisa diberikan kepada pihak Dinas KP Provinsi Sulut.

2. Kendala dan Saran seperti apa yang bisa dijabarkan?

- Kendalanya mungkin hanya pada proses membuat proposal pengajuan untuk permintaan bantuan, terkadang masih sulit untuk direalisasikan oleh pihak terkait. Untuk saran mungkin kedepannya bisa disosialisasikan lebih lagi, bagaimana proses untuk mengajukan proposal penerimaan bantuan dari Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara, agar supaya para UPR maupun POKDAKAN yang ada terutama yang tersebar di Kecamatan Dimembe bisa memahami prosesnya dan tidak menyebabkan kesalahpahaman.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemberdayaan Masyarakat Peternak Ikan Air Tawar di Kecamatan Dimembe belum tercapai sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Dinas KP Provinsi Sulut serta belum baiknya peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini yaitu masyarakat di Kecamatan Dimembe.

2. Setiap tahunnya Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara selalu melaksanakan kegiatan di daerah yang berbeda di Sulawesi Utara demi meratanya manfaat yang diberikan dalam bentuk Sosialisasi, Pelatihan, Sertifikasi, maupun bantuan-bantuan berupa benih ikan, pakan ikan, serta alat-alat untuk menunjang kegiatan budidaya masyarakat Sulawesi Utara, dengan cara melakukan observasi terhadap area konservasi yang potensial untuk dijadikan area atau kawasan budidaya perikanan.
3. Pada tahun 2019 terdapat 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas KP Provinsi Sulut, yaitu Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta Cara Pembesaran dan Pembenihan Ikan (CPP).
4. Mekanisme pemberian bantuan bagi masyarakat adalah masyarakat membuat proposal yang berisi rincian mengenai bantuan apa saja yang dibutuhkan serta anggaran yang diperlukan demi menunjang kegiatan budidaya perikanan masyarakat itu sendiri, lalu akan dilakukan peninjauan kembali dan diusulkan pada saat perancangan program kerja setiap akhir tahun.
5. Masyarakat bisa membentuk UPR (Unit Pembenihan Rakyat) maupun POKDAKAN (Kelompok Budidaya Ikan) menurut inisiatif sendiri dengan syarat tidak beranggotakan TNI/POLRI/ASN, Perangkat Desa/Kecamatan, Anggota Legislatif, serta karyawan BUMN

#### Saran

1. Perlunya peran Dinas Provinsi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang pro-aktif terhadap keluhan serta kebutuhan masyarakat di bidang budidaya perikanan, dikarenakan masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membudidayakan ikan secara mandiri atau tidak berkelompok dan hanya mengharapkan bantuan dari pihak swasta.
2. Melakukan sosialisasi lebih sering kepada masyarakat terutama

masyarakat yang berada di daerah yang sumber perairannya baik untuk dijadikan lahan budidaya ikan. Terutama masyarakat yang hanya melakukan kegiatan budidaya secara mandiri dan tidak tergabung dalam UPR atau POKDAKAN.

3. Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat agar supaya kegiatan tersebut bisa diawasi dan bisa dijadikan laporan kegiatan bagi pemerintah yang ada di area tempat kegiatan berlangsung.
4. Mengevaluasi serta mensosialisasikan kembali tentang proses pengajuan penerimaan bantuan kepada masyarakat terkait, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak Pemberi Bantuan maupun Penerima Bantuan.

#### Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia : Longman.
- Mardikanto, Prof. Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mulyono, Mugi dan Lusiana Ritonga. 2019. *Kamus Akuakultur (Budidaya Perikanan)*. Jakarta : STP Press
- Prijono, O.S dan A.M.W Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Rukminto, I.A. 2001. *Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat*,

- Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.